



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMAM BUDI UTOMO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **212079**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/90 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/70 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m²/160 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 405.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000



7. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000

8. MOTOR, YAMAHA B3F-I A/T Tahun 2018, HADIAH Rp. 17.000.000

9. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2019, HADIAH Rp.
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **120.300.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **693.798.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **3.769.598.000**

III. HUTANG Rp. **10**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **3.769.597.990**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.